



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOTOK SUHARTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN TAWANGMANGU**
3. NHK : **853824**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 282.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/163 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 815 m2/815 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 378 m2/378 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 94.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 234.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA DIA02N19MI A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, SUZUKI FU150SCD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOTOR, HONDA NC110A1C AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 37.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	555.500.000
III. HUTANG	Rp.	99.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	456.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.